



YOGYA SISAKAN 106,39 HEKTARE KAWASAN KUMUH

Bongkar Rumah Sendiri, Warga Tagih Renovasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Kawasan kumuh yang sebagian besar terdapat di bantaran sungai di Kota Yogyakarta hingga akhir 2017 tersisa 106,39 hektare. Warga bantaran sungai bahkan telah merelakan sebagian rumahnya dipangkas secara mandiri untuk mendukung penataan kawasan kumuh. Kini warga berharap bantuan renovasi susulan dari Pemkot Yogyakarta.

Salah satu titik permukiman warga yang telah dipangkas adalah di wilayah RT 53 RW 06 Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo di bantaran Sungai Gajah Wong. Salah seorang warga Balirejo, Sutilah Yustini mengaku sudah memangkas sebagian rumahnya mulai Oktober 2017. Rumahnya kini mundur 3 meter dari sungai, tapi belum tuntas sehingga kondisi bagian belakang rumah masih berantakan.

"Kami sudah pangkas bangunan dengan biaya sendiri pakai tenaga orang. Tidak ada ganti rugi. Itu yang dipangkas dulu untuk satu kamar tidur dan lainnya. Kami harap pemerintah segera menata," kata Yustini kepada *Merapi* ditemui di rumahnya, Jumat (12/1).

Rencana pemangkasan sebagian rumah itu sempat tidak disetujui suaminya. Dia lalu melakukan pemahaman dan melibatkan forum silaturahmi daerah aliran Sungai Gajah Wong. Lantaran sudah banyak warga bantaran di RT 53 yang telah memangkas rumah, akhirnya suaminya menyetujuinya. Selama ini tanah dan rumah yang ditempati bertahun-tahun belum memiliki sertifikat.

Dia berharap pemerintah bisa menata kembali sebagian rumah yang dipangkas tersebut. "Katanya setelah rumah dipangkas akan ditata direnovasi. Mau dibikin lantai dua dan rumah menghadap ke sungai. Setelah itu akan diproses untuk mendapat sertifikat hak guna bangunan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyatakan, sudah ada pemukiman warga di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Muja Muja yang dibongkar untuk dimundurkan sekitar 3 meter dari sungai untuk jalan inspeksi. Penataan itu dilakukan dengan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) yakni mundur, naik dan menghadap ke sungai.

"Penataan M3K ini tidak mudah. Kami sudah lakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat beberapa kali. Memang pembongkaran rumah didorong dilakukan mandiri. Pemerintah yang akan menata kawasan kumuh itu dan membangun fasilitas publik, tahun ini," terang Agus di ruang kerjanya.

Dia menyebut sampai akhir 2017 total masih ada 106,39 hektare kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang belum tertangani. Jumlah itu sudah berkurang dibandingkan luas kawasan kumuh awal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 216/2016 seluas 264,9 hektare. Ditargetkan pada akhir 2018 nanti bisa berkurang dan tersisa 54,07 hektare kawasan kumuh.

"Sembilan puluh persen kawasan kumuh kota ada di bantaran sungai. Penanganan kawasan kumuh tahun ini dilakukan secara keroyokan oleh pemerintah pusat, DIY dan kota," tambahnya.

Pada tahun 2018 penataan kawasan kumuh menyasar di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Pandeyan dan Muja Muju dengan anggaran Rp 9 miliar. Sedangkan bantaran Sungai Code di Soroetan dengan dana Rp 7,2 miliar. Penanganan kawasan kumuh tiga lokasi itu dengan dana dari pemerintah pusat melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman. (Tri)-m

Instansi

1. **DPUPKP**
2.
3.
4.
5.

Netral

Biasa

Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005